



Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
Volume 8 , Issues 2, 2019

KADER PENGGERAK: Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

Author : Supriyadi
Source : Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 8, Issues 2, 2019, 119-139.

To Cite the Article :

KADER PENGGERAK: Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, Supriyadi, Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 8, Issues 2, 2019

Copyright © 2019 Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
ISSN : 2303-3759 (Print), ISSN : 2685-8517 (Online)

 **Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial**
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**KADER PENGGERAK: Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang**

Supriyadi

soeprijadi3@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Women are a very productive source of labor in all fields. In this case village women tend to be housewives and their space to develop skills is very limited. Researchers aimed to determine the empowerment of cadres in the family welfare in the District of Pakis, Magelang Regency. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The subjects of this study were the Head of the Banyusidi Village, the Driving Cadre of the Banyusidi Village. In collecting data researchers used the method of observation, interviews and documentation. While in the data analysis techniques researchers used data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that PKK Cadre Empowerment based on the theory of the empowerment process was divided into 5 stages namely Enabling, Empowering, Protecting, Supporting, and Fostering. Of the 5 stages the process has not been able to run optimally, especially in Enabling and Fostering. While the factors which become obstacles in empowering women through PKK come from members and also from the environment. While the supporters are strong encouragement from the board and the existence of support from outside the group.

Keywords: *Empowerment of women, PKK, Family Welfare*

Abstrak

Perempuan merupakan sumber tenaga kerja yang sangat produktif dalam semua bidang. Dalam hal ini perempuan desa cenderung menjadi ibu rumah tangga dan ruang geraknya dalam mengembangkan ketrampilan sangat terbatas. Peneliti bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Kader penggerak dalam kesejahteraan keluarga di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Banyusidi, Kader Penggerak Desa Banyusidi. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data peneliti menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Kader PKK berdasarkan teori proses pemberdayaan dibagi menjadi 5 tahapan yaitu *Enabling, Empowering, Protecting, Suporting, dan Fostering*. Dari 5 proses tahapan tersebut belum bisa berjalan maksimal, terutama dalam *Enabling* dan *Fostering*. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan



perempuan melalui PKK berasal dari dalam anggota dan juga dari lingkungan. Sedangkan yang menjadi pendukungnya adalah dorongan yang kuat dari pengurus dan adanya dukungan dari luar kelompok.

Kata kunci: **Pemberdayaan perempuan, PKK, Kesejahteraan Keluarga**

A. Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan potensi yang dimiliki serta mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk menghadapi persoalan kependudukan terkait dengan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Salah satu persoalan yang sampai saat ini menjadi persoalan kependudukan adalah permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan¹. Masalah pemberdayaan perempuan erat kaitanya dengan masalah ketenagakerjaan, hal ini terlihat ketika mencari nafkah bukan hanya masalah kaum laki-laki akan tetapi perempuan juga memiliki andil didalamnya. Seperti dalam bidang pertanian, kaum perempuan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan yaitu dari penanaman kembali, pembenihan, pemupukan, panen, pasca panen, pengepakan dan pemasaran. Oleh sebab itu perempuan mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian baik di keluarga, masyarakat maupun dalam skala nasional. Berbagai pendapat menyatakan bahwa kegiatan produktif dan reproduktif perempuan pedesaan disatukan ke dalam pendapatan nasional bias memberikan kontribusi sebesar 30%-40% dari pendapatan kotor nasional².

Perempuan dipilih karena dalam keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak, salah satu yang berperan penting dalam membina keluarga adalah ibu. Sebagai seorang wanita, ibu dituntut juga untuk mempunyai waktu yang lebih lama untuk tinggal dirumah dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian maka wanita dituntut untuk dapat mengatur kehidupan rumah tangganya, terutama dalam fungsi sebagai pengasuh anak dan pengatur

¹ Zubaedi, wacana pembangunan alternatif, (yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007), hlm: 41-42.

² Esrom Aritonang, Pendampingan Komunitas Pedesaan, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa. 2011), hlm. 119.

konsumsi makanan dalam satu keluarga. Dalam membina keluarga ini, wanita memerlukan bekal pendidikan dan pengetahuan.

Perkembangan menunjukkan bahwa sesungguhnya wanita mempunyai potensi yang sama besarnya dengan potensi pria, karena itu dapat dikerahkan dalam pembangunan secara hukum wanita Indonesia berpeluang sama dengan pria/laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di semua bidang kehidupan. Pasal 21 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membeda-bedakan apakah pria ataupun wanita, dalam bidang-bidang pekerjaan, kesehatan, politik dan hukum, serta hak perseorangan. Wanita sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak dan kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan³.

Salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa dan kelurahan adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang mampu mengerahkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Organisasi PKK sudah melembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan dan kedamaian. Desa banyusidi merupakan suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk 6668 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3159 orang dan perempuan 3509 orang dengan

³ Hermi Yanzi Ima Wati, Irawan Suntoro, "PERANAN PKK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN WANITA DI KELURAHAN ENDANG REJO SEPUTIH AGUNG," *Jurnal Kultur Demokrasi* 3, no. 3 (2015), <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/8030/4875>.

jumlah KK adalah 1591 KK yang 5 tersebar di 20 dusun yang ada⁴. Organisasi PKK di Desa Banyusidi menjadi sarana penting untuk pemberdayaan perempuan. Dalam melaksanakan kegiatannya, PKK mampu memberikan kontribusi positif terhadap wanita sebagai ibu rumah tangga. Melalui PKK, wanita dapat mengaktualisasikan dirinya untuk aktif, selain perannya sebagai ibu rumah tangga. Sejak pertama kali berdiri sampai saat ini, PKK kelurahan Banyusidi terus melaksanakan program PKK, dan terus memberdayakan perempuan lewat program didalamnya, dengan tujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Untuk saat ini kader PKK berjumlah 90 orang dari 21 dusun yang ada di kelurahan Banyusidi. Program yang rutin dijalankan di kelurahan Banyusidi adalah di bidang kesehatan, pendidikan dan ketrampilan. Dalam hal kesehatan PKK berusaha untuk menanamkan nilai kepada masyarakat melalui posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulanya. Bidang pendidikan dan ketrampilan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk menambah ketrampilan bagi anggota-anggotanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam terkait dengan Pemberdayaan Kader PKK yang dilakukan oleh pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Penulis tertarik dengan isu tersebut karena perempuan di desa mayoritas dibatasi ruang geraknya dan tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Dengan adanya organisasi PKK, kaum perempuan di pedesaan khususnya Desa Banyusidi mereka lebih aktif mengikuti setiap kegiatan yang diadakan. Fokus pengamatan lebih ditekankan pada pemberdayaan perempuan melalui PKK, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan perempuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana Pemberdayaan Kader PKK di Kelurahan Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah meninjau dan memahami beberapa hasil penelitian sejenisnya untuk digunakan sebagai

⁴ Selayang pandang Desa Banyusidi”, <https://desabanyusidi.wordpress.com/2015/09/07/selayang-pandang-banyusidi/>”

bahan rujukan dan menghindari adanya persamaan pada penelitian yang akan dilaksanakan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Khodariyah yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui agrowisata Kampung sayur di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat proses pemberdayaan perempuan dengan tahap-tahap perencanaan, pendampingan, pelatihan, dan evaluasi serta monitoring. Adapun dampak dari pemberdayaan ini ialah terciptanya berbagai jenis kekuasaan seperti: kebebasan berpendapat, kebebasan menentukan pilihan pribadi, kebebasan memperoleh HAM, peningkatan ekonomi, memperoleh akses terhadap lembaga atau instansi, memperoleh sumber informasi dan pendidikan, kebebasan berbicara dalam sebuah forum dan keberlanjutan reproduksi dalam hal pendidikan⁵.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Alfianti yang berjudul “Pemberdayaan perempuan melalui usaha sosial ekonomis produktif keluarga miskin (Usep-KM) oleh Dinas Sosial DIY di Hargorejo Kokap Kulonprogo”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses pemberdayaan perempuan dimulai dari perencanaan program, peninjauan lokasi, rapat koordinasi, pembekalan pendamping, seleksi peserta, bimbingan ketrampilan, pemberian bantuan, monitoring, dan evaluasi sampai kembali kepada penumbuhan USEP-KM baru. Dampak yang ditimbulkan dari pemberdayaan-pemberdayaan tersebut berupa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan keluarga, mempererat hubungan persaudaraan antar sesama anggota kelompok USEP-KM, dan secara tidak langsung telah membentuk anggota untuk belajar berorganisasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya konflik yang timbul karena sudah banyak kelompok-kelompok simpan pinjam yang ada di Desa Hargorejo sehingga masing-masing kelompok tersebut saling mengunggulkan kelompoknya dan saling menjatuhkan kelompok lain⁶.

⁵ Siti Nur Khodariyah, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Agrowisata Kampung Sayur di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015).

⁶ Evi Alfianti, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM) Oleh Dinas Sosial DIY di Hargorejo Kokap Kulonprogo*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Saparwadi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : Studi di Kampung Demangan RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, strategi dalam pemberdayaan masyarakat oleh pengurus PKK Kampung Demangan RW 05 melalui lima tahap diantaranya adalah: (1) tahap sosialisasi. (2) tahap fasilitasi (3) tahap pemetaan tempat (4) tahap perencanaan (5) tahap pelaksanaan. Kedua, hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengurus PKK dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Demangan RW 05, menunjukkan bahwa pengurus PKK Kampung Demangan berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, jangkauan sumber produktif, dan partisipasi dalam proses pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada kondisi sosial serta ekonomi masyarakat⁷.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yakni menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamatinya. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini untuk menggambarkan, meringkas kondisi, situasi ataupun fenomena social yang ada dimasyarakat sebagai objek penelitian.

Lokasi penelitian ini yakni di kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang dengan sasaran yakni kader penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK). Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan sample yang telah dipilih oleh peneliti yakni unsure pemerintah, tim penggerak dan kader/anggota.

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Dan analisis data reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, menyusun hipotesis kerja. Sedangkan dalam melakukan uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data.

⁷ Saparwadi, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : Studi di Kampung Demangan RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, skripsi tidak di terbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016)

Ini dilakukan untuk membandingkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, baik data observasi, wawancara ataupun dokumentasi.

C. TINJAUAN TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pemberdayaan berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu *“empowerment”* yang artinya “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung⁸. Sedangkan menurut Eddy Ch yang dikutip oleh Zubaedi menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata⁹. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya¹⁰. Sedangkan Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat¹¹.

Tujuan dalam melakukan pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya¹².

⁸ Abu hurairah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 96.

⁹ Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007), Hlm: 42.

¹⁰ Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 60.

¹¹ Zubaedi, Wacana Pembangunan.... Hlm. 98

¹² Edi Suharto, Membangun Masyarakat.... Hlm. 60

Dalam pemberdayaan perempuan perlu adanya usaha untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi yang ada pada kaum perempuan secara utuh, baik aspek intelektualitas ataupun pengetahuan, kepribadian, dan ketrampilan. Pemberdayaan intelektual berarti menggunakan kemampuan akal semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan pemberdayaan kepribadian berarti mengembangkan daya ruhani untuk menguatkan keimanan dan kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya tanpa pengaruh dari luar dirinya (kemandirian), sehingga seseorang mempunyai kepercayaan diri (*self confidence*). Pemberdayaan ketrampilan berarti mengembangkan kreatifitas yang ada pada diri manusia untuk dapat menyesuaikan dan mengembangkan diri dengan lingkungannya¹³. Jim Ife menggunakan delapan (8) macam jenis kekuasaan dalam membuat kerangka konseptual untuk membuat indikator dalam melakukan pemberdayaan. Jenis-jenis kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Kekuasaan atas pilihan pribadi dan peluang hidup. Strategi pemberdayaan untuk mengupayakan dan memaksimalkan pilihan-pilihan efektif orang, sebagai bentuk untuk meningkatkan kekuasaan mereka atas keputusan yang menyangkut masa depan pribadi mereka. Agenda pemberdayaan, seharusnya bekerja untuk mengembangkan kemampuan individu dalam menentukan berbagai pilihan pribadi.
2. Kekuasaan untuk mempertahankan HAM. Deklarasi tentang HAM banyak diterapkan oleh pemimpin laki-laki di negara-negara minoritas, sehingga hal tersebut sering menguntungkan mereka yang memproklamasikannya. Dalam pertimbangan yang paling lebar, mereka yang mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan HAM, dengan mempertahankan hak yang dipertahankannya, seperti kebebasan berbicara atau berkumpul telah memperkuat kekuasaannya. Mereka tidak mengupayakan untuk membuat suara-suara kaum yang dirugikan dan termarginalisasi menjadi terdengar.

¹³ Nanih Mahendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 44.

¹⁴ Jim Ife Dan Frank Tesoriero, Community Development, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 144.

3. Kekuasaan atas definisi kebutuhan. Dalam sudut pandang pemberdayaan, masyarakat seharusnya diberikan kekuasaan untuk merumuskan dan mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat memerlukan adanya akses terhadap pendidikan dan informasi.
4. Kekuasaan atas ide atau gagasan. Untuk mengurangi dominasi elite kekuasaan atas ide perlu dikembangkan kapasitas warga masyarakat dalam memasuki forum dialog dalam pembuatan keputusan publik sehingga pendidikan (formal dan non-formal) merupakan aspek penting dari pemberdayaan.
5. Kekuasaan atas lembaga-lembaga. Strategi pemberdayaan juga bisa bertujuan untuk meningkatkan akses dan kontrol warga masyarakat terhadap institusi-institusi yang membuat keputusan publik, selain upaya perubahan terhadap institusi-institusi ini agar lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.
6. Kekuasaan atas sumberdaya. Salah satu strategi pemberdayaan adalah semaksimal mungkin memberi akses pada banyak orang terhadap pembagian dan penggunaan sumber daya yang lebih merata.
7. Kekuasaan atas kegiatan ekonomi. Proses pemberdayaan seharusnya juga memastikan bahwa kekuasaan atas aktivitas ekonomi dapat dibagikan (didistribusikan) secara adil meskipun tidak merata atau sama.
8. Kekuasaan atas reproduksi. Reproduksi tidak hanya diartikan sebagai proses kelahiran, melainkan juga proses membesarkan anak, memberikan pendidikan dan keseluruhan mekanisme (sosial, ekonomi, dan politik) yang mereproduksi generasi penerus. Kekuasaan atas reproduksi termasuk kategori kekuasaan atas pilihan pribadi dan kekuasaan atas ide.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 matra pemberdayaan (*empowerment*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras mikro. Pemberdayaan mikro dilakukan terhadap klien secara individu dengan melalui berberapa cara yaitu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk melakukan bimbingan atau memberikan pelatihan kepada klien untuk menjalankan tugas-tugas dalam

kehidupannya. Model ini biasa dikenal dengan model pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien yang sudah dikelompokkan. Pengelompokan klien dilakukan sebagai media dalam melakukan intervensi. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya intervensi tersebut digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi ini memiliki pandangan terhadap klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dalam proses pemberdayaan, Edi Suharto membagi menjadi 5 tahapan, yaitu: *Enabling, Empowering, Protecting, Supporting, Fostering*.

1. *Enabling* : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dengan membuat perencanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
2. *Empowering* : penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. *Protecting* : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi

yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas, dan masyarakat terasing.

4. *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Indikator dalam melakukan pemberdayaan perempuan dibedakan menjadi tiga(3) indikator yaitu: Indikator Keluaran, Indikator Hasil dan Indikator dampak¹⁵.

1. Indikator keluaran (*output indicator*) ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin.
2. Indikator hasil (*income indicator*) ditandai dengan perempuan miskin yang diberdayakan telah mampu berusaha meningkatkan ekonomi produktif sesuai ketrampilan mereka.
3. Indikator dampak (*impact indicator*) ditandai dengan perempuan yang diberdayakan telah mampu hidup layak, mampu mengembangkan usaha, berorganisasi atau bermasyarakat dan membantu perempuan lain masih miskin.

D. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PKK DALAM KONTEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya

¹⁵ Miran, Segresi Dan Kemiskinan Perempuan Dalam Secerah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian), Kementerian Sosial RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga (Tkp:2010) Hlm. 292.

keluarga sejahtera yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat dan mandiri berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan¹⁶. PKK merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang sudah begitu melembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Bahkan kemudian PKK dengan berbagai kegiatannya telah merambah hingga ke tingkat dusun dan RT. Agar pengelolaannya efektif maka di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa telah dibentuk Tim Penggerak (TP) PKK yang fungsinya selain mengkoordinir kegiatan, juga memfasilitasi berbagai kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Peningkatan minat yang tinggi terhadap gagasan-gagasan modal sosial dan masyarakat madani mendorong pemikiran tentang organisasi PKK sebagai modal sosial yang ada dalam masyarakat.

Kesejahteraan sosial merupakan segenap aktivitas dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup 3 (tiga) konsepsi:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu strategi untuk menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial tersebut. Melalui pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan keberfungsian sosial perempuan yang mencakup:

¹⁶Profil PKK Kab. Magelang, http://pkk.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=30.

1. Memenuhi atau merespon kebutuhan dasarnya (pendapatan, pendidikan, kesehatan).
2. Melaksanakan peran sosial sesuai dengan status dan tugas-tugasnya.
3. Menghadapi guncangan dan tekanan (misalnya masalah psikososial dan krisis ekonomi).

E. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI KADER PENGGERAK

Pemberdayaan Kader PKK dibedakan menjadi beberapa tahapan dalam pemberdayaan yaitu proses pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan, dan hasil pemberdayaan. Selain itu juga akan dibahas mengenai faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Kajian ini merupakan analisis dan pembahasan yang merupakan bagian dari inti penelitian.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Enabling

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dengan membuat perencanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dapat dipahami bahwa *enabling* adalah proses pemberdayaan yang melibatkan masyarakat untuk ikut turut serta dalam membuat rencana kegiatan dan juga membuat keputusan kelompok. Dalam hal ini bermusyawarah sangat penting untuk merencanakan suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama-sama. Musyawarah yang dilakukan oleh PKK Desa Banyusidi disetiap bulannya melalui perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bantuan perangkat desa. PKK dan perangkat desa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pelatihan. Perencanaan tersebut dilakukan dengan para pengurus PKK dan perangkat desa yang bersangkutan dalam bidang kesejahteraan social. Pelatihan didasarkan dari Sumber Daya Alam yang ada di daerah tempat tinggal mereka.

Tujuannya adalah untuk memudahkan mencari bahan baku yang akan digunakan tidak asing bagi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Daryani selaku Ketua PKK, sebagai berikut:

Nek rencana kegiatan kui biasane PKK ngusulke neng desa liwat KAUR KESRA (Kesejahteraan Masyarakat), nek usulane kui disetujui karo Pak Lurah yo tinggal golek mlaku wae kegiatane, tapi kadang yo diwenahi ngerti seko desa arep ono pelatihan, walaupun PKK dewe ora ono rencana¹⁷.

Terjemahan: Kalau rencana kegiatan itu biasanya PKK mengusulkan ke desa liwat KAUR KESRA (Kesejahteraan Masyarakat), kalau missal usulan tersebut disetujui oleh Bapak Kades kita tinggal menjalankan kegiatannya, kadang-kadang juga kita diberitahu dari desa bahwa akan diadakan pelatihan gitu, walaupun PKK sendiri tidak merencanakannya.

Pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PKK dalam hal membuat perencanaan kegiatan untuk dilaksanakan sebagai pembinaan terhadap Kader PKK dengan cara mengusulkan melalui Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan kemudian menunggu keputusan dari kepala desa untuk waktu pelaksanaannya.

Selain itu juga terkadang perangkat desa sendiri sudah merencanakan untuk melakukan pelatihan ataupun sejenisnya untuk dilaksanakan oleh PKK. Dalam hal perencanaan kegiatan penting untuk dilakukan musyawarah karena dari perencanaan awal mula suatu kegiatan itu akan berjalan secara terus menerus dan akan mengetahui hasil yang akan dicapai. Kader PKK merupakan pokok dari PKK itu sendiri namun dalam hal perencanaan kegiatan tidak dilibatkan secara langsung. Sehingga para Kader PKK tidak mengetahui rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kalaupun dilibatkan juga tidak semua perencanaan kegiatan itu terlibat. Seperti yang diungkapkan Ibu Trimah selaku Kader PKK Desa Banyusidi, sebagai berikut:

nek rencana kegiatan biasane kadang-kadang dilibatke, biasane yo langsung ono undangan neng balai desa ono pelatihan ngono thok, kadang yo nek pas selapanan langsung diisi koyo penyuluhan KB, KDRT, Pelecehan seksual ngono kui.¹⁸

Terjemahan : Kalau rencana kegiatan biasanya kadang-kadang terlibat, biasanya ya langsung ada surat undangan untuk hadir ke balai desa ada pelatihan gitu, kadang pas selapanan langsung diisi missal penyuluhan KB, KDRT, pelecehan seksual kaya gitu

¹⁷ Wawancara dengan Daryani, Ketua PKK Desa Banyusidi

¹⁸ Wawancara dengan Trimah, Pengurus PKK Desa Banyusidi

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan yang dilakukan oleh PKK tidak semuanya melibatkan undangan untuk menghadiri acara di balai desa yang berkaitan dengan kegiatan PKK. Ada juga yang pas waktu acara rutin tiap bulan sudah disiapkan pemateri dari luar untuk mengisi penyuluhan ataupun sejenisnya.

2. *Empowering*

Penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. Penguatan pengetahuan dan kemampuan ini diwujudkan oleh PKK Desa Banyusidi dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada kader-kader PKK. Pelatihan tersebut dimaksudkan sebagai bekal untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh kader PKK dan juga untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Desa Banyusidi. Seperti pernyataan Ibu daryani berikut ini:

pkk banyusidi nganake pelatihan-pelatihan gawe kader-kader, ono pelatihan jahit, masak, jamur merang, gawe anyaman, pelatihan ngelola pekarangan kosong, wes okeh nek pelatihan kui, dik. Biasane seng ngisi seko BLK, Bapermas, UPK kui kerjasamne karo desa pak lurah seng nyalurke.,aksute seko pelatihan kui yo ben kadere kui iso nambah ketrampilan sukur-sukur iso gawe usaha seko pelatihan kui. Soale nek di delok-delok potensi neng desa banyusidi kan sumber dayane okeh seng durung dimanfaatke.¹⁹

Terjemahan: PKK Banyusidi mengadakan pelatihan-pelatihan buat kader-kader, ada pelatihan jahit, masak, jamur merang, buat anyaman, pelatihan mengelola pekarangan kosong, sudah banyak, dik. Biasanya yang ngisi dari BLK, Bapermas, UPK itu kerjasamanya sama desa pak lurah yang menyalurkan, maksudnya dari pelatihan itu ya biar kadernya itu bisa menambah ketrampilan sukur-sukur bisa buat usaha dari pelatihan itu. Soalnya kalau dilihat-lihat potensi di Desa Banyusidi kan sumber dayanya banyak yang belum dimanfaatkan.

Pernyataan diatas disimpulkan bahwa PKK Banyusidi dengan dampingan pemerintah desa bekerjasama dengan instansi lain sebagai mitra untuk melakukan penguatan pengetahuan dan juga kemampuan tersebut. Pelatihan yang diberikan juga bervariasi seperti pelatihan menjahit,

¹⁹ Wawancara dengan Daryani, Ketua PKK Desa Banyusidi

Pembuatan keranjang bambu, pemanfaatan pekarangan, ternak lele dan yang lainnya. Karena potensi sumber daya yang ada di Desa Banyusidi sangat banyak dan belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan bisa memaksimalkan sumber daya tersebut untuk penghasilan masyarakat Desa Banyusidi. Dari pelatihan yang pernah dilakukan oleh PKK Desa Banyusidi menghasilkan kelompok-kelompok kecil yaitu: kelompok menjahit, Kelompok Wanita Tani (KWT), bank sampah.

3. *Protecting*

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas, dan masyarakat terasing. Wujud yang diberikan PKK Desa Banyusidi dalam hal perlindungan terhadap kaum minoritas atau lemah dalam penelitian ini tidak ditemukan. Hal itu disebabkan karena PKK Desa Banyusidi dalam memberikan perlindungan bersifat umum terhadap semua kader maupun anggota PKK melalui pinjaman. Pinjaman ditujukan untuk membantu bagi kader yang sewaktu-waktu mengalami kesulitan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Besaran pinjaman juga tidak dibatasi jumlahnya dan pengembalian pinjaman tersebut bisa diangsur setiap minggu ataupun setiap bulan.

4. *Supporting*

Pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dukungan yang diberikan oleh PKK terhadap kadernya adalah dengan memberikan bimbingan terhadap kader PKK yang tersebar di seluruh dusun yang ada di wilayah Desa Banyusidi melalui pertemuan secara rutin. Wujud dari bimbingan tersebut adalah dengan memberikan pendampingan terhadap

anggota PKK yang ingin belajar menjahit. Bimbingan tersebut diberikan melalui kader PKK yang tergabung dalam kelompok menjahit. Selain itu wujud dukungan diberikan PKK Desa Banyusidi adalah dengan mengajak istri dari pamong desa untuk berperan aktif mengajak anggota PKK untuk datang dalam setiap pertemuan yang ada, karena dengan adanya kehadiran dari istri pamong desa dapat membuat penyemangat tersendiri bagi kader-kader PKK yang mengikuti kegiatan tersebut. seperti pernyataan Ibu Daryani berikut ini:

bentuk dukungan nek seko pkk dewe yo ngenahi motivasi wae nggo kaderkadere ben podo tetep semangat melu kegiatane, nek iso yo dadi contoh neng desone dewe-dewe. Sakliyane kui seng penting malah dukungan seko perangkat desa.aku biasane wajibke bojone kadus-kadus kui tak kon melu setiap kegiatan ben iso kader-kader liane kui yo teko, kan kui iso gawe dukungan. La mosok kadere dikon mangkat tapi seng koyo bojone kadus kok ra mangkat kan iso gawe ra semangat kader liane.²⁰ Terjemahan: Bentuk dukungan kalau dari pkk sendiri ya memberikan motivasi saja buat kader-kadernya biar tetap semangat mengikuti kegiatannya, kalau bisa ya jadi contoh di dusunya masing-masing. Selain itu yang penting malah dukungan dari perangkat desa.aku biasanya mewajibkan istrinya kaduskadus itu saya suruh ikut setiap kegiatan biar bisa kader-kadernya yang lain ya datang, kan itu bisa buat dukungan. La masak kadernya disuruh berangkat tapi yang seperti istrinya kadus nggak berangkat kan bisa buat semangat kader lainnya.

Pernyataan diatas disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan oleh PKK Desa Banyusidi terhadap kadernya adalah dengan memberikan motivasi untuk tetap semangat mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu dukungan juga datang dari kehadiran langsung dari perangkat desa sebagai wujud dukungan emosi untuk bersama-sama menjalin keberlangsungan dalam organisasi PKK tersebut.

5. *Fostering*

Memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha. Hal tersebut diwujudkan PKK Desa Banyusidi melalui pergantian tanggung jawab dalam melakukan pencatatan arisan dan juga penanggung jawab

²⁰ Wawancara dengan Daryani, Ketua PKK Desa Banyusidi

kegiatan yang ada di setiap dusun. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada setiap kader maupun anggota PKK Desa Banyusidi untuk bisa merasakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Seperti pernyataan Ibu Kendi berikut ini:

Biasane kader utowo anggota kui diwenahi tanggung jawab nyatet arisan saben sasine. Le nyatet kui biasane dig anti saben sasine, ben kabeh iso ngrasake. Sakliyane kui yo kader dikon dadi penanggung jawab program sing ono neng desone dewe-dewe kui yo dig anti terus penanggung jawabe. Penggantian kui yo kanggo kabeh anggota pkk seng ono. Ben kabeh due roso tanggung jawab lan yo biso ngrasake nek dadi pengurus kui rasane kepiye.²¹

Terjemahan Biasanya kader atau anggota itu diberikan tanggung jawab mencatat arisan setiap bulan. Nyatatnya itu biasanya diganti setiap bulan, biar semua bisa merasakan. Selain itu ya kader disuruh jadi penanggung jawab program yang ada di dusunnya masing-masing itu ya diganti terus penanggung jawabnya. Penggantian itu ya buat semua anggota pkk yang ada. Biar semua punya rasa tanggung jawab dan juga bisa merasakan kalau jadi pengurus itu seperti apa.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pergantian tanggung jawab yang dilakukan oleh anggota PKK Desa Banyusidi dalam hal melakukan pencatatan arisan dan juga tanggung jawab program yang ada di dusun masing-masing agar tetap berjalan. Pergantian tersebut untuk semua anggota PKK baik itu anggota yang tergolong perempuan kaya maupun miskin. Selain itu maksud dan tujuan dari pergantian tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk bisa merasakan menjadi penanggung jawab dan juga pengurus dalam organisasi.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil Penelitian tersebut, mengenai upaya pemberdayaan perempuan melalui kader penggerak PKK menyatakan bahwa pemberdayaan sudah berjalan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama dalam pemberdayaan yang dilakukan yakni proses *enabling*, dengan melakukan tahapan perencanaan dengan melibatkan berbagai sector. Kedua, *empowering* yang dilakukan yakni dengan mengadakan pelatihan dan penguatan pengetahuan atas bekerjasama dengan berbagai lembaga. Ketiga,

²¹ Wawancara dengan kendi, anggota PKK Desa Banyusidi

protecting, tahapan ini dilakukan dengan berupaya melindungi masyarakat yang tergolong lemah. Keempat, dengan memberikan *supporting* kepada kader melalui pinjaman model usaha. Kelima, *fostering* dilakukan dengan pergantian tanggungjawab terhadap pencatatan arisan dalam setiap bulannya. Hal ini dilakukan sebagai bahan pembelajaran terhadap sesama anggota/ kader untuk merasakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan juga distribusi kekuasaan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abu hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2011.
- Alfianti, Evi. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM) Oleh Dinan Sosial DIY di Hargorejo Kokap Kulonprogo, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014).
- Aritonang, Esrom. *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa. 2011.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Ife, Jim Dan Tesoriero, Frank. *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ima Wati, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi. "PERANAN PKK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN WANITA DI KELURAHAN ENDANG REJO SEPUTIH AGUNG." *Jurnal Kultur Demokrasi* 3, no. 3 (2015). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/8030/4875>.
- Khodariyah, Siti Nur. Pemberdayaan Perempuan Melalui Agrowisata Kampung Sayur di Pilahan, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015.
- Miran, Segresi Dan Kemiskinan Perempuan Dalam Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian), Kementerian Sosial RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga (Tkp:2010).
- Nanih Mahendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Profil PKK Kab. Magelang, <http://pkk.magelangkab.go.id>
- Saparwadi. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : Studi di Kampung Demangan RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016
- Selayang pandang Desa Banyusidi", <https://desabanyusidi.wordpress.com/2015/09/07/selayang-pandang-banyusidi>
- Zubaedi. *wacana pembangunan alternatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.

Wawancara dengan Daryani, Ketua PKK Desa Banyusidi
Wawancara dengan Trimah, Pengurus PKK Desa Banyusidi
Wawancara dengan Daryani, Ketua PKK Desa Banyusidi
Wawancara dengan kendi, anggota PKK Desa Banyusidi